

PROSPEKTIF PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM KONSTRUKSI MULTIKULTURAL MASYARAKAT INDONESIA

Abu Amar Bustomi

abuamarbustomi@yahoo.com
STAIS Salahuddin Pasuruan

Abstrak: Multikulturalisme dalam hal ini bukan hanya sebuah wacana namun sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep dalam bentuk bangunan konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan pemahaman dan pengembangan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta fungsinya dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep ini harus dikomunikasikan antar para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkannya. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lain yang relevan.

Kata kunci: Konstruksi Sosial, Budaya, Multikultural, Masyarakat Indonesia.

Abstract: Multiculturalism in this case is not just a discourse but an ideology that must be fought, because it is needed as a foundation for democracy, human rights and the welfare of society. Multiculturalism is not an ideology that is independent from other ideologies. Multiculturalism requires a set of concepts in the form of building a concept that can be used as a reference for understanding and development in the context of social life. To understand multiculturalism, someone needs a foundation of knowledge in the form of building concepts that are relevant and supportive to the

existence and function of the human life. The building concept is to be communicated between the experts who have the same scientific concern about multiculturalism, thus there is a common understanding and mutual support in the struggle. Various concepts that are relevant to the multiculturalism include democracy, justice and law, cultural values and ethos, unity in diversity, equal ethnic, ethnicity, culture, religious beliefs, expressions of culture, domain private and public, human rights, cultural rights of community, and other concepts that are relevant.

Keywords: Social Construction, Culture, Multicultural, Indonesian Society.

Pendahuluan

Dalam suatu masyarakat pasti akan menemukan banyak kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan karakteristik itu berkenaan dengan tingkat diferensiasi dan stratifikasi sosial. Masyarakat seperti ini disebut sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat Multikultural disusun atas tiga kata, yaitu *Masyarakat*, *Multi*, dan *Kultural*. "*Masyarakat*" artinya adalah sebagai satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus dan terikat oleh rasa toleransi bersama, "*Multi*" berarti banyak atau beranekaragam, dan "*Kultural*" berarti Budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya suku bangsa yang memiliki struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa yang lainnya.

Multikultural juga dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut.

Berikut ini pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian masyarakat multikultural. JS Furnivall Menyatakan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri, tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Clifford Geertz menyatakan bahwa masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam

subsistem yang lebih kurang berdiri dan masing-masing subsistem terikat oleh ikatan primordial. J Nasikun menyatakan bahwa suatu masyarakat multikultural bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki subkebudayaan yg bersifat deverse yang di tandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan sosial, serta sering munculnya konflik sosial.

Adapun ciri-ciri dari masyarakat multikultural adalah sebagai berikut: memiliki lebih dari subkebudayaan; membentuk sebuah struktur sosial; membagi masyarakat menjadi dua pihak, yaitu pihak yang mendominasi dan yang terdominasi; rentan terhadap konflik sosial. Dalam multikultural akan dijumpai perbedaan-perbedaan yang merupakan bentuk keanegaragaman seperti budaya, ras suku, agama. Dalam masyarakat multikultural tidak mengenal perbedaan hak dan kewajiban antara kelompok minoritas dengan mayoritas baik secara hukum maupun sosial.

Memahami Realitas Bangsa

Sudah menjadi Sunatullah bahwa keragaman (pluralitas) merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, baik pluralitas dalam hal agama, etnik maupun budaya masyarakat. Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*). Hal ini dapat dilihat dari realitas sosial yang ada, bukti kemajemukan ini juga dapat dibuktikan melalui semboyan dalam lambang negara Republik Indonesia yang berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika.” Masyarakat Indonesia yang plural, dilandasi oleh berbagai perbedaan, baik horizontal maupun vertikal. Perbedaan horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama. Sementara perbedaan yang bersifat vertikal yakni menyangkut perbedaan-perbedaan lapisan atas dan bawah, yang menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya.

Konflik dan pertikaian sebenarnya tidak hanya terjadi pada masyarakat plural, namun terjadi pula pada masyarakat yang relatif homogen. Namun yang pasti masyarakat plural (heterogen) relatif lebih sering mengalami konflik daripada masyarakat yang homogen. Masyarakat Jepang relatif jarang terjadi konflik, karena karakteristik homogenya, berbeda dengan masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, wacana kerukunan dan toleransi antar umat beragama telah menyedot banyak energi dan pikiran. Fenomena disharmoni ditandai dengan beberapa benturan sosial yang dimanipulasi menjadi pertentangan antar kelompok umat beragama.

Ketidakharmonisan antar pemeluk agama, secara kategoris simplistik dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang bersikap disebabkan faham keagamaan terhadap ajaran agamanya. Seperti kecenderungan faham radikal-ekstrim dan fundamental-subjektif terhadap ajaran yang dianut. Demikian pula sikap eksklusivisme, literalisme dan kesalahpahaman. Selain itu sikap hedonitas dan oportunitas sebagai faktor eksternal dengan mengatasnamakan agama untuk komoditas kepentingan, telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Dalam konteks inilah, pluraritas agama menjadi perhatian yang penting bagi masyarakat Indonesia. Terlebih jika kita melihat relitas bangsa, bahwa agama-agama besar di dunia, selain Yahudi, dapat hidup dan berkembang di Indonesia.¹

Mengingat secara geografis bangsa Indonesia terdiri belasan ribu kepulauan, maka pluralitas agama bisa dipastikan melahirkan tradisi budaya yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini melahirkan implikasi yang dilematis. Pada satu sisi, keragaman ini akan melahirkan dinamika sosial yang ditandai dengan adanya kompetisi sosial dalam berbagai lapangan kehidupan, dan yang demikian bisa menjadi kekuatan pendorong lahirnya berbagai kreativitas sosial, sehingga terwujud pembaharuan dalam berfikir maupun bertindak. Namun pada sisi yang lain keragaman beragama apabila tidak mampu dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sumber konflik sosial dengan kepekaan/sensitivitas yang tinggi.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, suatu hal yang paradoks mungkin terjadi, globalisasi yang seharusnya membawa arah positif (integrasi) ternyata juga terdapat indikasi-indikasi disintegrasi. Proses global yang direfleksikan oleh masyarakat akan memunculkan tanggapan yang berbeda, hal ini akan memunculkan resistensi yang berdampak disintegrasi, atau terlihat pula dari adaptasi-adaptasi yang dilakukan masyarakat terhadap berbagai pengaruh globalisasi.

Globalisasi pada dasarnya telah melahirkan suatu jenis ideologi yang menjadi embrio pembentukan, pelestarian dan perubahan dasar masyarakat yang bertumpu pada proses identifikasi diri dan pembentukan perbedaan antara orang. Dalam hal ini kapitalisme akan menjadi kekuatan penting (apalagi setelah runtuhnya komunisme dan

¹ Lihat Said Agil Husain Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Umat Beragama* (Jakarta: Ciputat Press, 2002).

sosialisme) yang mengarah pada pembentukan status dengan simbol-simbol modernitas yang menegaskan nilai-nilai autentik.

Modernisasi akan membawa masyarakat ke dalam proses estetisasi kehidupan, yakni menguatnya kecenderungan hidup sebagai proses seni, produk yang dikonsumsi tidak lagi dilihat dari fungsi, namun dari simbol yang berkaitan dengan identitas dan status. Dalam hal ini sesuatu yang semula memiliki nilai etik akan cenderung bergeser ke estetika. Pada saat ini Georg Simmel sebagaimana dikutip Abdullah menyebut agama sebagai “*the work of art*” (karya seni), agama menjadi “*private of business*” (bisnis pribadi).

Akhir-akhir ini dampak dari globalisasi sudah semakin terasa dalam berbagai bidang kehidupan, baik hubungan antar negara, bangsa, apalagi suku atau etnis. Hubungan antar orang yang berlatar belakang agama, bangsa, suku, dan adat istiadat yang berbeda-beda semakin intens. Bentuk-bentuk komunikasi pun semakin bervariasi dan banyak pilihan, terutama sebagai akibat kemajuan teknologi informasi (*information technology*). Setiap orang dapat berkomunikasi secara efisien, murah dan cepat, seperti komunikasi melalui fasilitas elektronik, seperti TV, internet, email, dan lain-lain. Dahulu, sebelum era kemajuan teknologi informasi, orang bisa saja melakukan pembatasan-pembatasan atau bentuk-bentuk proteksi lainnya untuk—misalnya—membatasi pergaulan dengan kelompok atau bangsa tertentu.

Namun, pada saat sekarang ini, cara-cara seperti itu sudah tidak mungkin lagi ditempuh. Pilihan-pilihan bentuk dan alat komunikasi sudah demikian luas. Bahkan karenanya, pergaulan antar manusia, suku bangsa dan negara sudah sedemikian bebas dan terbuka. Di satu sisi fenomena kemajuan ini mendatangkan kemudahan-kemudahan; namun di sisi lain liberalisasi yang muncul dari globalisasi ini harus dapat diantisipasi agar tidak malah mengakibatkan munculnya kesulitan-kesulitan baru dalam kehidupan manusia. Banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai eksese kemajuan ini. Kendatipun demikian, bagaimanapun, hubungan kemanusiaan dengan siapapun dan kapanpun harus tetap dijaga untuk saling memahami, menghargai dan atau menghormati satu dengan lain agar terjadi suasana harmoni. Dalam hal ini, dunia yang sedang kita jalani dan alami ini—di sudut manapun—tidak bisa mengelak dari sifat multikulturalnya.

Konsep Dan Konteks Multikulturalisme di Indonesia

Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan

tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah “masyarakat multikultural Indonesia” dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak “masyarakat majemuk” (*plural society*). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang *bhinneka tunggal ika* bukan lagi keanekaragaman sukubangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.²

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.³ Dalam model multikulturalisme ini, masyarakat (termasuk masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam mozaik masyarakat. Di dalam mozaik tercakup unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang lebih kecil, yang membentuk masyarakat yang lebih besar, yang memiliki kebudayaan.⁴ Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan kebudayaan bangsa, seperti yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi, “kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah.”

Walaupun multikulturalisme telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia, namun realitasnya konsep ini masih terkesan asing. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, namun multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Oleh karena itu, ulasan multikulturalisme, mau tidak mau, juga akan mengulas berbagai

² Parsudi Suparlan, *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?* (Makalah Disampaikan dalam Seminar, 2001).

³ Parsudi Suparlan, “Indonesia Baru Dalam Perspektif Multikulturalisme”, Dalam *Harian Media Indonesia* (10 Desember 2001).

⁴ Ibid.

permasalahan yang mendukung ideologi ini, yakni politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, serta tingkat mutu produktivitas.

Kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa Barat maka sampai dengan Perang Dunia ke-2 masyarakat tersebut hanya mengenal adanya satu kebudayaan, yakni kebudayaan Kulit Putih yang Kristen. Golongan lain yang ada dalam masyarakat tersebut merupakan kalangan minoritas dengan segala hak yang dibatasi atau dikebiri. Di Amerika Serikat berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950-an. Puncaknya adalah pada tahun 1960an dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang Kulit Putih terhadap orang Kulit Hitam dan Berwarna di tempat-tempat umum, yang dilanjutkan munculnya perjuangan Hak-Hak Sipil melalui berbagai kegiatan *affirmative action* yang membantu mereka yang terpuruk dan minoritas untuk dapat mengejar ketinggalannya dari golongan Kulit Putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam bidang pekerjaan dan usaha.⁵

Di tahun 1970-an upaya-upaya untuk mencapai kesederajatan dalam perbedaan mengalami berbagai hambatan, karena corak kebudayaan Kulit Putih yang Protestan dan dominan itu berbeda dengan corak kebudayaan orang Kulit Hitam, orang Indian atau Pribumi Amerika, dan kebudayaan-kebudayaan bangsa serta sukubangsa yang tergolong minoritas. Untuk mengatasi masalah ini, para cendekiawan dan pejabat pemerintah pro demokrasi dan HAM, yang anti rasisme-diskriminasi melakukan proses penyebarluasan konsep multikulturalisme dalam bentuk pengajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah di tahun 1970-an. Bahkan anak-anak Cina, Meksiko, dan berbagai golongan sukubangsa lainnya dewasa ini dapat belajar dengan menggunakan bahasa ibunya di sekolah sampai dengan tahap-tahap tertentu.⁶ Jadi kalau Glazer mengatakan bahwa "*we are all multiculturalists now*" (sekarang ini kita semua adalah multikulturalis) dia menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada masa sekarang ini di Amerika Serikat, dan gejala tersebut adalah produk dari serangkaian proses-proses pendidikan multikulturalisme yang dilakukan sejak tahun 1970-an.

⁵ Supardi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural* (Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002).

⁶ Ibid.

Jika akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, maka pengertian kebudayaan diantara para ahli harus dipersamakan (disenergiskan) antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep yang dipunyai ahli lainnya. Demikian pula karena multikulturalisme merupakan ideologi dan alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia dan operasionalitasnya melalui pranata-pranata sosial.

Selanjutnya sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme akan terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, ekonomi dan bisnis, politik, serta kegiatan lain dalam masyarakat, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal. Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada, dalam nilai-nilai budaya dan etos, etika, serta pembenahan dalam hukum dan penegakkan hukum bagi keadilan. Dalam upaya ini, perlu adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman budaya lokal maupun nasional serta berbagai corak dinamikanya.

Konsep Multikultural dalam Pemahaman Agama

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang konsep multikultural dalam kehidupan pesantren dan masyarakat, maka kita kembali pada beberapa prinsip pokok, sebagaimana berikut. (1) Islam adalah agama yang bersifat universal, Islam bukan diperuntukkan bagi salah satu suku bangsa, etnis, tertentu, atau golongan tertentu, melainkan sebagai *rahmat^{um} li-al-'alamin*. (2) Islam menghargai agama-agama dan kepercayaan agama lain, Islam juga mengajarkan tidak ada pemaksaan dalam beragama. (3) Islam juga merupakan agama yang terbuka untuk diuji kebenarannya. (4) Islam juga menegaskan bahwa keanekaragaman dalam kehidupan umat manusia adalah alamiah, perbedaan itu mulai dari jenis kelamin, suku, dan bangsa yang beraneka ragam. Perbedaan itu agar terjadi saling mengenal. (5) Islam memiliki sejarah yang cukup jelas terkait dengan kehidupan yang majemuk sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sendiri ketika membangun masyarakat madani di Madinah. Sebagai sebuah negara (waktu itu masih berbentuk negara kota (*city state*) dan belum menjadi negara bangsa (*nation state*), Madinah sudah mengakui, menghargai, dan mengakomodasi berbagai etnik dan berbagai golongan. Semua warga negara menikmati hak hidup dan dilindungi oleh undang-undang,

sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah (*Madinah Charter*). Prinsip-prinsip dasar seperti ini, merupakan pemahaman yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengembangkan pendidikan multikultural.

Atas dasar beberapa prinsip tersebut di atas, maka sesungguhnya Islam sendiri pada dasarnya memberikan ruang yang seluas-luas pada pendidikan multikultural. Bahwa perbedaan-perbedaan itu justru telah dijelaskan sendiri oleh al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa Allah bukannya tidak mampu membikin umat manusia ini menjadi satu umat saja, melainkan dijadikan berbeda-beda atau bergolong-golongan agar setiap orang atau setiap golongan dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Di samping itu, dalam ayat lain, Allah memang secara alamiah menjadikan umat manusia itu berbangsa-bangsa (*syu'ub^{an}*) dan berkelompok-kelompok (*qabā'ilⁱⁿ*), agar mereka saling mengenal. Oleh karena itu, tidak selayaknya ditutup-tutupi, apalagi diingkari adanya kelompok-kelompok itu. Sebagai ajaran yang terbuka, juga tidak selayaknya para umatnya memiliki rasa takut untuk terpengaruh oleh ajaran lain. Ketakutan dapat dimaknai sebagai penyandang mental kalah atau ekspresi penyakit rendah diri (*inferiority complex*) yang seharusnya dihindari oleh umat Islam. Atas dasar keyakinan yang kokoh, maka Islam memberikan kebebasan umatnya bergaul secara bebas dan terbuka dalam pentas pergaulan umat manusia sejagat. Rasulullah, pernah berkirim surat ke Raja Heraklius, untuk memperkenalkan ajaran Islam. Oleh karena itu konsep pendidikan multikultural bukan malah di jauhi, melainkan sebaliknya harus dihadapi secara obyektif dan penuh percaya diri. Di sinilah para pendidik Islam membuktikan bahwa Islam dapat mewujudkan rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk menyebarkan rahmat kepada setiap manusia dengan berbagai latar belakang kultural.

Pendidikan multikultural, bukan bias tauhid atau mentauhidkan beberapa ajaran agama menjadi suatu agama baru. Namun pendidikan multikultural terbatas pada pengembangan prinsip-prinsip dasar pergaulan antarsesama manusia (*ukhuvah bashariyyah*). Oleh karena itu dalam konteks maupun kontennya, semangat multikultural dapat diintegrasikan secara langsung dalam kontens kurikulum dan dikontekstualisasikan dalam bentuk pendekatan maupun metodologi yang strategis, pragmatis dan relevan, dengan didukung *hardware*, serta penyiapan, pembinaan dan pengembangan manajemen dan SDM yang memadai dalam kehidupan pesantren dan masyarakat.

Dalam konteks pluralitas sosial, Islam mengajarkan prinsip-prinsip: (1) kasih sayang antar sesama, (2) saling mengenal, (3) saling

menghargai, (4) saling tolong menolong. Sebaliknya, Islam melarang bertindak merendahkan orang lain, bermusuhan-musuhan, apalagi saling membinasakan, karena dalam pandangan Islam, menghina manusia sama dengan merendahkan ciptaan manusia yang termulia. Islam melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi, lebih-lebih menumpahkan darah, menghilangkan nyawa dengan alasan yang tidak benar. Islam mengkategorikan tindakan membunuh atau menumpahkan darah tanpa alasan yang benar sebagai dosa besar. Al-Qur'an menegaskan bahwa membunuh satu jiwa sama artinya dengan membunuh seluruh manusia. Konsep Islam tentang tata pergaulan seperti ini mesti dikedepankan sebagai basis dalam mengembangkan pendidikan.

Di lingkungan pesantren, pengembangan pendidikan dengan kesadaran multikultural, masih tergolong baru. Walaupun sesungguhnya dalam tataran doktrin yang bersumber dari ajaran Islam, al-Qur'an dan al-Sunnah, sejak diturunkan ajaran ini, sudah diperkenalkan. Hanya saja, oleh karena gejala hidup multikultural merupakan fenomena baru, setidaknya di Indonesia, maka pro dan kontra selalu akan terjadi, sebab hal yang demikian sudah menjadi kelaziman tatkala hal-hal baru diperkenalkan atau terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi, sebagaimana lazimnya perubahan itu toh akhirnya akan diterima jika hal itu sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari lagi.

Tidak terlalu berlebihan kiranya, ketika kita memiliki faham bahwa jika agama-agama diberikan secara terbuka, maka justru akan memperkokoh keyakinan yang dimiliki oleh masing-masing pemeluk. Cara-cara yang dilakukan sebagian masyarakat untuk melakukan proteksi berlebihan, malah justru akan menjadikan miskin informasi tentang dunia luar, dan akan memiliki efek yang membahayakan. Dalam beragama, bahwa meyakini hanya agamanya sendirilah yang paling benar (sebagai bentuk klaim kebenaran atau *truth claim*) adalah suatu keniscayaan. Akan tetapi, semestinya keyakinan seperti itu tidak harus merendahkan agama—atau meniadakan hak hidup keyakinan lain—lebih-lebih jika bertindak demikian kepada orang yang memeluk agama lain.

Yang dipentingkan adalah bahwa pengakuan membenarkan agama sendiri dibekali oleh tanggung jawab, baik bersumber kitab suci atau alasan-alasan lainnya yang dapat dibangunnya. Berangkat dari pandangan ini, maka kita akan dapat terhindar dari sikap keberagaman yang hanya bersifat ikut-ikutan. Bahkan jika kita mau sadari

sepenuhnya, Islam mengajarkan umatnya agar beragama secara sungguh-sungguh atau *kāffah*. Artinya, dalam beragama, Islam tidak menghendaki beragama secara setengah-setengah. Islam yang *kāffah* adalah Islam yang secara kumulatif mendatangkan kebaikan, kebersamaan, kedamaian, keadilan, dan keamanan bersama.

Pendidikan Pesantren: Kontruksi Sosial Budaya Multikultural Masyarakat

Sebuah pertanyaan yang sering muncul adalah, mungkinkah konstruksi sosial budaya multikultural masyarakat dikembangkan melalui kontekstualisasi pendidikan multiKultural dalam lingkungan pesantren. Sementara stigma yang berkembang adalah bahwa pendidikan pesantren merupakan pendidikan agama—seperti halnya *civil education*—di institusi-institusi pendidikan yang sering dikesankan sebagai sistem rekayasa sosial pendidikan yang bercorak dogmatis, doktriner, monolitik, dan tidak berwawasan multikultural. Agama di satu sisi membentuk tipe-tipe kultur masyarakat; bahkan, membentuk kultur yang begitu khas sehingga secara sosiologis sering muncul dalam bentuknya yang sangat eksklusif. Agama manapun kemudian menampilkan corak kultural pemeluknya yang khas dan eksklusif pula.

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dijelaskan bahwa Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional, lembaga sosial dan penyiaran agama⁷ yang dewasa ini banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, baik dari kalangan “luar” maupun “dalam” pesantren. Hal ini memberikan nilai lebih bagi pesantren dalam hubungannya dengan penegasan eksistensi kelembagaan yang telah mampu berperan secara positif dalam kehidupan berbangsa selama ini.

Selain itu, perhatian tersebut akan menghidupkan suasana dialogis di antara komunitas pesantren yang banyak terlupakan pada masa belakangan ini. Padahal apabila diamati, pesantren sejak berdirinya senantiasa berupaya berdialog dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kedudukannya yang mengakar di tengah-tengah masyarakat tidak memungkinkan pesantren untuk tampil terisolir, apalagi eksklusif.⁸

Filosofi lahirnya pesantren menurut sementara kalangan, sama persis seperti filosofi wujudnya pasar sebagai tempat jual beli, di mana para pembeli dan penjual tidak dapat begitu saja “dipaksa” menempati pasar tersebut. Namun interaksi antara pembeli dan penjual itu sendiri

⁷ Lihat Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INNS, 1994).

⁸ Lihat M.A. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994).

yang menciptakan tempat yang disebut pasar. Gambaran seperti itulah yang semula melahirkan pesantren. Dan ini merupakan cermin intensifnya dialog antara pesantren dengan lingkungannya.

Dialog ini tercipta secara alamiah, karena berdirinya pesantren adalah kehendak masyarakat. Justru tidak masuk akal, apabila pesantren tidak dapat berdialog dengan “pemilik”-nya sendiri. Tidak pernah tersebut dalam sejarah, bahwa pesantren adalah hasil paket dari kalangan tertentu. Dengan demikian, setidaknya ada dua hal yang mendukung terciptanya fenomena dialogis pesantren dengan masyarakat. Pertama, karena tempat dan kedudukannya yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dan kedua, pendirian pesantren itu sendiri berasal dari karsa masyarakat yang membutuhkan kehadirannya.

Dengan demikian, sasaran pesantren sebenarnya adalah masyarakat luas. Keberadaan pesantren di tengah masyarakat sebagai suatu lingkungan kehidupan, pada hakikatnya membawa sebuah misi yaitu upaya merangkul kehidupan dalam jalinan nilai-nilai sepiritual dan moralitas yang Islami. Selanjutnya pesantren dalam hal ini, akan berfungsi sebagai kontrol dan sekaligus stabilisator dalam proses perkembangan masyarakat yang sering menimbulkan ketimpangan sosial maupun kultural. Dan jika terjadi ketimpangan, maka pesantren sudah barang tentu akan menjadi sasaran kritik dan gugatan.

Posisi pesantren yang sedemikian strategis dalam membangun dialog dengan masyarakat, dapat menjadi potensi besar dalam rangka membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan menghargai antar elemen masyarakat dari berbagai karakter dan latar belakangnya. Salah satu yang bisa dilakukan pesantren adalah membangun toleransi antar umat beragama. Sebuah toleransi yang dibangun atas dasar kesadaran bersama akan pluralitas agama demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Sebuah kesadaran bahwa pluralitas keagamaan di mana pun di dunia ini, kecuali di tempat-tempat tertentu, adalah realitas yang tidak mungkin diingkari. Kontak-kontak antara komunitas-komunitas yang berbeda agama semakin meningkat. Hampir tidak ada di belahan bumi sekarang ini kelompok masyarakat yang tidak pernah mempunyai kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama. Jaringan komunikasi telah menembus tembok-tembok pemisah yang dahulunya mengisolasi kelompok-kelompok keagamaan dalam masyarakat. Benarlah jika dikatakan bahwa pluralitas keagamaan, sebagaimana pluralitas-pluralitas lain seperti pluralitas etnik, pluralitas kultural, dan pluralitas bahasa,

adalah semacam hukum alam. Artinya, mengingkari pluralitas keagamaan sama dengan mengingkari hukum alam.⁹

Menyadari potensi di atas pada dasarnya pesantren sebagai institusi sosial pendidikan dan keagamaan, berarti sangat memungkinkan untuk melakukan proses penumbuhkembangan kehidupan masyarakat multikultural. Proses ini pada hakekatnya tetap berbasis pada pesantren sebagai *civil education*, yang memiliki potensi untuk melakukan proses rekayasa sosial (*social engeneering*) dengan hanya membalik paradigma atau orientasinya yang eksklusif menjadi inklusif, yang tadinya masih bersifat doktriner, dogmatis, dan tidak berwawasan multikultural, diubah orientasinya—juga pendekatan dan metodologinya—agar menjadi institusi pendidikan yang tidak malah justru memunculkan ekkses negatif, yakni permusuhan antaragama, antarbudaya, antarsuku, dan antargolongan. Di Barat, perbedaan kultur menyebabkan konflik, sehingga di sana gagasannya adalah pendidikan multikultural. Di Indonesia, pemicu konflik seringkali bersumber dari perbedaan keagamaan, baik antaragama maupun interagama. Atas dasar ini maka pendidikan agama berwawasan agama-agama menjadi sangat penting. Artinya, pendidikan harus memberi ruang bagi eksistensi, pengakuan, dan penghormatan kepada agama-agama lain.

Catatan Akhir

Sasaran pesantren adalah masyarakat luas. Keberadaan pesantren di tengah masyarakat sebagai suatu lingkungan kehidupan, pada hakikatnya membawa sebuah misi yaitu upaya merangkum kehidupan dalam jalinan nilai-nilai sepirtual dan moralitas yang Islami. Selanjutnya pesantren dalam hal ini, akan berfungsi sebagai kontrol dan sekaligus stabilisator dalam proses perkembangan masyarakat yang sering menimbulkan ketimpangan sosial maupun kultural. Dan jika terjadi ketimpangan, maka pesantren sudah barang tentu akan menjadi sasaran kritik dan gugatan. Posisi pesantren yang sedemikian strategis dalam membangun dialog dengan masyarakat, dapat menjadi potensi besar dalam rangka membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan menghargai antar elemen masyarakat dari berbagai karakter dan latar belakangnya. Salah satu yang bisa dilakukan pesantren adalah membangun toleransi antar umat beragama. Sebuah toleransi yang dibangun atas dasar kesadaran bersama akan pluralitas agama demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.[]

⁹ Lihat Mun'im A Sirry (ed.), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004).

Daftar Rujukan

- Mahfudz, M.A. Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INNS, 1994.
- Munawar, Said Agil Husain Al. *Fiqih Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Sirry, Mun'im A., Ed. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Suparlan, Parsudi. *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Suku bangsa atau Kebudayaan?*. Makalah Disampaikan dalam Seminar, 2001.
- _____. "Indonesia Baru Dalam Perspektif Multikulturalisme". Dalam *Harian Media Indonesia*. 10 Desember 2001.
- _____. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.